

ANALISIS PERBANDINGAN PELAPORAN KEUANGAN KOPERASI DENGAN PENERAPAN SAK ETAP (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam PGRI Ranting I Pondok Ranji Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan)

SLAMET SOESANTO, RITA, PUPUT ALING

Prodi D3-Akuntansi, Politeknik Swadharma

ritasatriajuqra@gmail.com

Abstrak

Koperasi merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Azas kekeluargaan menjadi kata kunci di dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan di Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. SAK ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik merupakan standar yang diterapkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Pelaporan keuangan koperasi mengikuti prosedur dan standar SAK ETAP. Pelaporan keuangan berupa Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, Koperasi Simpan Pinjam PGRI Ranting I Pondok Ranji secara umum sudah menyajikan komponen laporan keuangan yang mendekati klasifikasi dari SAK ETAP, hanya masih butuh penyesuaian dan pemahaman yang lebih mengenai penyajian dan pelaporan yang sesuai dengan SAK ETAP.

Kata Kunci : Koperasi, SAK ETAP

Abstract

Cooperatives are one of the pillars of the Indonesian economy. Cooperative is a business entity consisting of individuals or legal entities of cooperatives by basing their activities based on cooperative principles, as well as the people's economic movement on the principle of kinship. The principle of kinship is the key word in Article 33 paragraph 1 of the 1945 Constitution and in Article 1 of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. SAK ETAP or Entity without Public Accountability Financial Accounting Standards is a standard that is applied to entities without public accountability. Financial reporting of cooperatives follows SAK ETAP procedures and standards. Financial reporting in the form of a Balance Sheet, Income Statement, Statement of Changes in Equity, Cash Flow Reports, and Notes to Financial Statements, PGRI Branch Savings and Loans Cooperative Branch Ranji I has generally presented financial report components that are close to the classification of SAK ETAP, only still need adjustments and a better understanding of the presentation and reporting in accordance with SAK ETAP.

Keywords: Cooperatives, SAK ETAP

PENDAHULUAN

Perekonomian di Indonesia ditopang oleh tiga kelompok pelaku ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut merupakan pilar atau sokoguru perekonomian Indonesia.

Krisis ekonomi yang pernah terjadi di akhir tahun sembilan puluhan telah melumpuhkan tiang perekonomian Indonesia. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing khususnya dolar berimbas pada kinerja keuangan perusahaan swasta terutama yang mengandalkan transaksi bisnisnya terkait langsung dengan valuta asing. Melonjaknya harga kebutuhan pokok dan penurunan daya beli masyarakat semakin memperparah kondisi ekonomi Indonesia. Demikian pula dengan Badan Usaha Milik Negara menghadapi kesulitan yang sama. Hal ini membutuhkan pemulihan ekonomi yang tidak mudah dan cepat, dengan menggunakan segala aspek sumberdaya yang tidak sedikit serta komitmen yang kuat dalam pelaksanaannya. Pada situasi seperti ini kehadiran koperasi di tengah-tengah masyarakat memiliki andil dalam meringankan beban ekonomi masyarakat yang berkepanjangan.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berkepentingan untuk senantiasa meningkatkan pertumbuhan

ekonomi masyarakatnya melalui pembinaan pilar ekonomi yang dianggap mampu menopang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Koperasi

Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan". Nama koperasi memang tidak disebutkan dalam pasal tersebut, akan tetapi "asas kekeluargaan" tercantum di Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang koperasi yaitu perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung). Di dalam prakteknya di masyarakat muncul beberapa jenis koperasi yang menurut penjelasan KBBI diartikan sebagai berikut :

1. Koperasi konsumsi koperasi yang menyediakan keperluan sehari-hari bagi anggotanya;
2. Koperasi produksi koperasi yang

membuat barang dan dijual bersama-sama;

3. Koperasi simpan pinjam koperasi yang khusus bertujuan melayani atau mewajibkan anggotanya untuk menabung, di samping dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya;

Para ahli mendefinisikan koperasi sebagai berikut:

1. Muhammad Hatta (1994): koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan kepentingan bersama, bukan keuntungan.
2. ILO (dikutip oleh Edilius & Sudarsono, 1993): koperasi adalah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.
3. G. Mladenata, di dalam bukunya "*Histoire Desdactrines Cooperative*" mengemukakan bahwa koperasi terdiri

atas produsen-produsen yang secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.

4. Erdman, dalam bukunya "*Passing monopoly as an aim of Cooperative*" bahwa koperasi adalah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biaya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi.

Fungsi dan Peran Koperasi

Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya. Koperasi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat, dapat menjadikan pelopor untuk mensejahterakan masyarakat, dan dapat memulihkan perekonomian Indonesia.

Pasal 4 UU Nomor 25/1992 menyebut, empat fungsi dan peran koperasi, antara lain:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya

mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi dikelola oleh pengurus yang dipilih oleh rapat anggota. Oleh karena itu pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota. Tugas dan pekerjaan pengurus harus mendapat pertimbangan dan pengesahan oleh rapat anggota seperti perolehan pendapatan dan biaya operasi serta hal-hal lainnya yang dipandang perlu untuk operasional koperasi. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil.

Setiap akhir tahun laporan keuangan koperasi harus dibuat dan ditujukan kepada para pengguna meliputi anggota, calon anggota, pengurus koperasi, kreditur dan pemerintah. Anggota dan calon anggota membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui kekayaan dan kewajiban koperasi, kinerja koperasi serta manfaat ekonomi yang diperoleh dengan menjadi

anggota koperasi atau dengan memanfaatkan produk atau jasa koperasi. Oleh karena itu, laporan keuangan koperasi harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

SAK ETAP

SAK ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik merupakan standar yang diterapkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal (pemiilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit).

Entitas memliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pendaf taran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masya rakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang

efek, dana pensiun reksa dana dan bank investasi.

SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas. SAK ETAP diterapkan oleh usaha kecil dan menengah, karena tidak memperjualbelikan sahamnya di pasar modal.

Mengingat penjelasan yang demikian itu maka Koperasi termasuk ke dalam salah satu entitas tanpa akuntabilitas publik, jadi koperasi menggunakan SAK ETAP sebagai standar dari penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dari pihak koperasi tentang SAK ETAP guna penyusunan laporan keuangan koperasi, mulai dari akun-akun yang disajikan pada laporan keuangan koperasi, bentuk laporan keuangan koperasi, dan perlakuan akuntansi di dalam laporan keuangan koperasi yang telah dibuat.

Penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan suatu koperasi dirasa sangat penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas laporan

keuangan koperasi yang berguna untuk proses audit maupun bahan evaluasi bagi kreditur.

Laporan Keuangan ETAP

Menurut IAI dalam SAKETAP2.1(2009), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk memenuhi suatu kebutuhan informasi tertentu dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga dapat menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Rudianto (2010: 12) laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu institusi tertentu bukan tanpa tujuan sama sekali, tetapi memiliki tujuan tertentu. Walaupun satu institusi memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, tetapi secara umum laporan keuangan disusun dengan tujuan berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu institusi.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi suatu institusi yang terjadi

ketika melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh keuntungan.

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi institusi untuk menghasilkan keuntungan di masa mendatang.
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.
5. Untuk mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut institusi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2009), laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan yang lengkap meliputi : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tepat 1 Januari 2011, SAK-ETAP ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan.

ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba/rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi

setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

Jika hal ini diterapkan dengan tepat, koperasi dapat membuat laporan keuangan tanpa harus dibantu oleh pihak lain dan dapat dilakukan audit terhadap laporannya tersebut.

Penerapan SAK ETAP menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah mencakup pos-pos berikut ini

Tabel 1. Pos-Pos SAK ETAP

PERKIRAAN	SAK ETAP
Penyajian Laporan Keuangan	Minimum pos yang harus ada di neraca lebih sedikit. Silent terhadap pos luar biasa, laporan laba rugi (tanpa harus menyajikan laba rugi komprehensif), cash flow dengan metode tidak langsung
Aset Tetap dan Properti Investasi	Aset tetap, properti investasi menggunakan metode biaya kecuali ada ketentuan pemerintah yang mengharuskan model revaluasi diterapkan.
Aset Tidak Berwujud	Aset tidak berwujud diamortisasi selama 10 tahun. Pengukuran menggunakan metode biaya.
Instrumen Keuangan	Ruang lingkup; investasi pada efek tertentu- Klasifikasi trading, held to maturity, dan available for sale. Hal tersebut mengacu pada PSAK no 50 (1998). Jauh lebih sederhana dibanding ketentuan PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006)
Persediaan	LIFO tidak diijinkan, ketentuan lainnya sama dengan PSAK
Penurunan nilai	Ruang lingkup yang meliputi semua

Aset	jenis aset kecuali aset yang timbul dari manfaat pensiun. Tidak mengatur penurunan nilai goodwill.- Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK 31.
Laporan Keuangan Konsolidasian	Tidak diatur bila memiliki investasi atas asosiasi maupun subsidiary menggunakan metode ekuitas (on line consolidation).
Sewa	Tidak mengatur perjanjian yang mengandung sewa (psak 8). Klasifikasi sewa; kombinasi IFRS for SMEs dan SFAS 13 (rule based). Laporan keuangan lessee dan lessor menggunakan PSAK 30 (1990): Sewa
Biaya Pinjaman	Biaya pinjaman langsung dibebankan.
Imbalan Kerja	Tidak termasuk imbalan berbasis ekuitas. Untuk manfaat pasti menggunakan PUC dan jika tidak bisa, menggunakan metode yang disederhanakan.
Pajak Penghasilan	Menggunakan tax payable concept. Tidak ada pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan.

(Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, 2009)

Laporan Keuangan Koperasi

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007 yang pernah berlaku di Indonesia (PSAK No. 27 tahun 2007), laporan keuangan koperasi terdiri dari :

1. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan koperasi, dan hibah/donasi. Simpanan sukarela dimasukkan dalam utang lancar. Hal ini disebabkan Simpanan Sukarela merupakan simpanan yang dapat diambil setiap saat. Aktiva disajikan menurut

tingkat likuiditas dan utang disusun berdasarkan jatuh temponya.

2. Perhitungan Hasil Usaha (PHU)

Laporan perhitungan hasil usaha atau laporan sisa hasil usaha (SHU) memuat hasil usaha dengan anggota dan laba/rugi kotor dengan non anggota. Pada dasarnya harus diadakan pemisahan antara penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri dan terhadap pihak ketiga atau nonanggota. Demikian pula harus dibedakan penjualan kepada anggota dan bukan anggota. Jadi bagian sisa hasil usaha yang diperoleh dari pelayanan terhadap pihak ketiga, termasuk bukan anggota, tidak boleh dibagikan pada anggota karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota sehingga lebih baik digunakan untuk biaya cadangan.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi perubahan kas pada periode tertentu yang terdiri dari saldo awal, sumber penerimaan, pengeluaran kas pada periode tertentu.

4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang mengikhtisarkan manfaat ekonomi yang didapat anggota selama periode tertentu.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (disclosure) yang memuat

- a. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi baik dengan anggota maupun dengan non anggota.
- b. Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dll.
- c. Dasar penetapan harga pelayanan baik kepada anggota maupun kepada non anggota.

Akun-akun dalam laporan keuangan koperasi

Akun yaitu suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang dimiliki koperasi secara spesifik seperti: Asset, Utang, Modal, Pendapatan dan Beban). Berikut ini adalah akun-akun yang secara garis besar terdapat di laporan keuangan akuntansi.

Akun-Akun Dalam Laporan Keuangan Koperasi	
Asset: <ul style="list-style-type: none"> • Kas • Piutang Anggota • Perlengkapan kantor 	Modal : <ul style="list-style-type: none"> > Simpanan Pokok > Simpanan wajib > Modal sumbangan > Modal penyertaan > cadangan
Utang/Liability: <ul style="list-style-type: none"> • Utang usaha • Utang Bank • Simpanan Sukarela • Dana-dana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota 2. Pengurus 3. Pegawai 4. Pendidikan 5. Pembangunan DK 6. Sosial 	Pendapatan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Partisipasi bruto ○ Partisipasi neto ○ Pendapatan Non anggota Beban : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Beban Operasional ✓ Beban Pokok ✓ Beban Perkoperasian ✓ SHU

Gambar 1. Daftar Akun Keuangan Koperasi

Sisi aktiva terdiri dari aset dan hutang, yang termasuk aset antara lain kas,

piutang anggota dan perlengkapan kantor. Sedangkan yang termasuk dalam hutang antara lain utang usaha, utang bank, simpanan sukarela, dan dana-dana yang didapatkan dari anggota, pengurus, pegawai, Pendidikan, pembangunan, dan sosial. Sedangkan sisi pasiva terdiri dari modal, pendapatan, dan beban. Modal terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal sumbangan, modal penyertaan, dan cadangan. Pendapatan terdiri dari partisipasi bruto, partisipasi neto, dan partisipasi non anggota. Sedangkan beban terdiri dari beban operasional, beban pokok, beban perkoperasian dan SHU.

Metode pembagian SHU adalah sebagai berikut:

$$\text{SHU Jasa Transaksi} = \frac{\text{Bagian SHU atau Jasa Transaksi}}{\text{Total Transaksi Anggota}}$$

$$\text{SHU Jasa Modal} = \frac{\text{Bagian SHU atau Jasa Transaksi}}{\text{Total Modal Anggota}}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. (Kasiram 2010)

Penelitian jenis kuantitatif disebut juga penelitian ilmiah. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan Observasi : pengamatan lapangan dan pengumpulan data laporan keuangan dari objek penelitian

Wawancara : meminta penjelasan dari nara sumber objek penelitian

Studi literatur :membaca sumber informasi yang berupa pendapat para ahli, peraturan tentang SAK ETAP dan undang-undang perkoperasian,

PEMBAHASAN

Koperasi PGRI Ranting I Pondok Ranji Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan didirikan pada tahun 1990 dan berkedudukan di Jl. Pertamina Raya Pondok Ranji Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Banten. Didirikan oleh Bapak Mujiman selaku Kepala Sekolah di Ranting 1 dan masih dalam naungan PGRI.

Koperasi ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Koperasi tersebut bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Koperasi PGRI memiliki anggota yang terdiri dari pemilik dan sekaligus anggota pengguna jasa seperti guru-guru yang bekerja di Sekolah PGRI Ranting I Pondok Ranji Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.

Adapun usaha yang dilakukan oleh Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji yaitu melakukan beberapa kegiatan transaksi, seperti :

a. Menghimpun dana simpanan wajib

setiap bulannya kepada seluruh anggota koperasi.

b. Melakukan kegiatan simpan pinjam dengan ketentuan angsuran yang berlaku pada unit simpan pinjam Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji.

Tujuan Laporan Keuangan Koperasi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya. Pengguna utama dari laporan keuangan koperasi adalah :

- a. Para anggota Koperasi
- b. Pejabat Koperasi
- c. Calon Anggota Koperasi
- d. Bank
- e. Kreditur, dan
- f. Kantor Pajak

Adapun tujuan atau kepentingan pemakai terhadap laporan keuangan Koperasi, adalah

- a. Menilai pertanggungjawaban pengurus,
- b. Menilai prestasi pengurus,
- c. Menilai manfaat yang diberikan Koperasi terhadap anggotanya,
- d. Menilai kondisi keuangan Koperasi (rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas)
- e. Sebagai bahan pertimbangan untuk menemukan jumlah sumber-sumber daya dan jasa yang akan diberikan kepada Koperasi.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Berikut ini jenis laporan keuangan yang diharuskan disusun oleh entitas yang sesuai dengan SAK ETAP, yaitu :

1. Neraca;

Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu—akhir periode pelaporan. Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

2. Laporan Laba Rugi;

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakuidalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Entitastidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas yang menunjukkan :

- a. Seluruh perubahan dalam ekuitas
- b. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan

pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

Ekuitas Koperasi terdiri dari : Modal Anggota, Modal Sumbangan, Modal Penyertaan, Modal Penyertaan Partisipasi Anggota, SHU Periode Berjalan, Cadangan

4. Laporan Arus Kas;

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kasentitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan,

Catatan atas Laporan Keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlahyang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP di Koperasi PGRI Ranting 1

Pondok Ranji

Entitas harus menetapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan SAK ETAP. Kebijakan akuntansi yang diterapkan harus konsisten. Perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan jika diminta oleh SAK ETAP dan atau menghasilkan informasi yang andal dan lebih relevan. Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai persyaratan SAK ETAP dan atau secara retrospektif. Perubahan retrospektif adalah suatu penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji dalam setiap periodenya telah membuat kebijakan akuntansi, namun karena keterbatasan data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan metode wawancara guna memperoleh data tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji. Kebijakan akuntansi yang terdapat dalam Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji yaitu :

1. Pengakuan

Dalam laporan posisi keuangan yang telah dibuat Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji menggunakan dasar akrual basis yaitu mencatat transaksi-transaksi atau mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya dan bukan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun

biaya tersebut dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, dan juga mencatat jumlah hutang dan piutang perusahaan.

2. Pengukuran

Kas diukur dari saldo tunai koperasi uang dimiliki koperasi per 31 Desember. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan tanpa memperhitungkan nilai residu, karena SAK ETAP tidak mengatur tentang adanya nilai residu. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Beban perbaikan dan pemeliharaan termasuk ke dalam beban operasi koperasi yang dibebankan pada laporan sisa hasil usaha pada saat terjadinya. Piutang usaha diakui pada saat terjadinya transaksi pinjaman uang atau barang anggota koperasi.

3. Penyajian

Aset tetap Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji melakukan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Berdasarkan pencatatan Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji dilakukan penyesuaian, menunjukkan bahwa telah sesuai dengan SAK ETAP. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual menggunakan konsep biaya historis. Laporan keuangan tersebut disajikan

secara relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi oleh pemakai dan andal.

4. Pengungkapan

Dalam pengungkapan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, serta diungkapkan pula kebijakan akuntansi yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Untuk itu sebuah entitas perlu membuat catatan atas laporan keuangan termasuk Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji, sebagai tambahan informasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Praktik Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam PGRI Ranting I Pondok Ranji Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan

Praktik akuntansi dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh koperasi. Dalam Peraturan Menteri Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.

Pelaporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam PGRI Ranting I Pondok Ranji Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan tahun 2017 dan 2018.

1. Laporan Posisi Keuangan

Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji pada tahun 2017 dan 2018 telah menyusun laporan posisi keuangan, dan tidak ada perbedaan yang signifikan diantara penyajian kedua tahun pelaporan keuangan tersebut. Laporan posisi keuangan Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji menyajikan pos-pos umum seperti aset lancar, aset tidak lancar, aset tetap, liabilitas lancar, dan kekayaan bersih. Aset lancar dalam laporan posisi keuangan Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, dan persediaan. Ada penambahan akun pada laporan posisi keuangan Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji tahun 2018 yaitu Top EDC, tetapi tidak terlalu berdampak yang signifikan terhadap laporan posisi keuangan Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji tahun 2018. Aset tidak lancar dalam laporan posisi keuangan Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji hanya menyajikan investasi dalam bentuk saham. Aset tetap dalam laporan posisi keuangan Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji terdiri dari biaya perolehan dan akumulasi

penyusutan, dimana penjelasan lebih rinci terhadap aset tetap dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji. Liabilitas lancar dalam laporan posisi keuangan Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji terdiri dari utang usaha dan utang leasing. Ada penambahan akun pada laporan posisi keuangan Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji pada tahun 2018 yaitu utang pajak dan utang pihak berelasi. Kekayaan bersih dalam laporan posisi Keuangan Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, SHU belum dibagi, SHU tahun berjalan, dan selisih saldo awal per tahun.

2. Laporan Sisa Hasil Usaha

Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji pada tahun 2017 dan 2018 telah menyusun laporan sisa hasil usaha, dan tidak ada perbedaan yang signifikan diantara penyajian kedua tahun pelaporan keuangan tersebut. Laporan sisa hasil usaha Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji menyajikan pos-pos umum seperti partisipasi anggota, partisipasi non anggota, beban operasi, dan pendapatan atau beban lain-lain. Partisipasi anggota dari laporan sisa hasil usaha Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji terdiri dari partisipasi bruto anggota dan partisipasi neto anggota.

Partisipasi bruto anggota terdiri dari akun pendapatan dan beban pokok. Partisipasi non anggota dari laporan sisa hasil usaha Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji terdiri dari penjualan dan harga pokok. Beban Operasi adalah biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas penjualan barang atau jasa oleh koperasi kepada anggota dan non anggota. Pendapatan Lain, adalah pendapatan yang diterima sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha koperasi. Beban Lain, adalah beban yang dikeluarkan oleh koperasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha koperasi.

3. Laporan Perubahan Kekayaan Bersih

Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji pada tahun 2017 dan 2018 telah menyusun laporan perubahan kekayaan bersih, dan tidak ada perbedaan yang signifikan diantara penyajian kedua tahun pelaporan keuangan tersebut. Laporan perubahan kekayaan bersih Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji menyajikan pos-pos seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan saldo selisih seting saldo awal per periode sebelumnya, dimana pos ini merupakan pos sebagai saldo awal dari laporan perubahan kekayaan bersih. Laporan

perubahan kekayaan bersih Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji juga menyajikan pos-pos seperti simpanan pokok disetor, simpanan wajib disetor, pengembalian simpanan, dana SHU – untuk anggota yang mengundurkan diri, sisa hasil usaha belum dibagi, sisa hasil usaha tahun berjalan, dimana pos ini merupakan pos yang berguna untuk menambah atau mengurangi saldo awal periode guna menentukan apakah saldo akhir akan mengalami laba atau rugi pada akhir periode tersebut.

4. Laporan Arus Kas

Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji pada tahun 2017 telah menyusun laporan arus kas, namun Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji pada tahun 2018 tidak menyusun laporan arus kas. Laporan arus kas Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji menyajikan pos-pos umum yang terbagi menjadi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi dalam laporan arus kas yang disajikan oleh Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji pada tahun 2017 terdiri dari penurunan piutang anggota, penurunan persediaan, kenaikan utang usaha, dan kenaikan utang leasing. Aktivitas investasi dalam laporan arus kas yang disajikan oleh Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji pada tahun 2017 hanya satu aktivitas

yaitu, penurunan aktiva tetap. Aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas yang disajikan oleh Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji pada tahun 2017 terdiri dari kenaikan simpanan pokok, kenaikan simpanan wajib, kenaikan pengembalian simpanan, dan kenaikan sisa hasil usaha belum dibagi.

5. Catatan atas Laporan keuangan

Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji pada tahun 2017 dan 2018 telah menyusun catatan atas laporan keuangan, dan tidak ada perbedaan yang signifikan dari penyajian kedua tahun pelaporan tersebut. Catatan atas laporan keuangan Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji tidak menyajikan bagaimana kebijakan akuntansi dari Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji. Catatan atas laporan keuangan yang disajikan Koperasi PGRI Ranting 1 Pondok Ranji hanya memaparkan pos-pos yang bertujuan memberi informasi lebih terinci dari pos-pos pada laporan keuangan lainnya

Perbandingan SAK ETAP terhadap Laporan Keuangan di Koperasi Simpan Pinjam PGRI Ranting I Pondok Ranji Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan

Laporan keuangan yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan

ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

1. Neraca

Pada koperasi simpan pinjam PGRI ranting 1 Masih menggunakan nama Laporan Sisa Hasil Usaha dalam pelaporannya, belum menggunakan nama Neraca. Tidak adanya pos properti investasi, aset tidak berwujud, aset dan kewajiban pajak, dan kewajiban diestimasi. Dalam aset tetap tidak menyajikan kendaraan dan inventaris kantor, tetap menggantinya dengan biaya perolehan dan akumulasi penyusutan. Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa Neraca minimal mencakup pos-pos yang terdiri dari Kas dan setara kas, Piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, aset tetap, aset tidak berwujud, Utang usaha dan lainnya, Kewajiban pajak, Kewajiban estimasi serta ekuitas

2. Laporan laba rugi

Pada koperasi simpan pinjam PGRI ranting 1 Masih menggunakan Laporan Sisa Hasil Usaha, belum menggunakan nama Laporan Laba Rugi. Tidak adanya pos beban pajak, dikarenakan koperasi simpan pinjam PGRI ranting 1 belum memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos yang terdiri dari pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan

metode ekuitas, beban pajak dan laba atau rugi neto.

3. Laporan perubahan ekuitas

Pada koperasi simpan pinjam PGRI ranting 1 Masih menggunakan nama Laporan Perubahan Kekayaan Bersih, belum Menggunakan nama Laporan Perubahan Ekuitas. Pos-pos dalam penyajian laporan perubahan ekuitas di Koperasi Simpan Pinjam PGRI 1 disesuaikan dengan pos-pos dalam entitas koperasi pada umumnya. Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan laba atau rugi untuk periode, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas, untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah sesuai dengan perubahan yang terjadi. Entitas menyajikan dilaporan laba rugi dan saldo laba pos-pos berikut sebagai tambahan atas informasi saldo laba awal pada awal periode pelaporan, dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode, penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu, penyajian kembali saldo laba setelah perubahan

kebijakan akuntansi, saldo laba pada akhir periode pelaporan.

4. Laporan Arus Kas

Pada koperasi simpan pinjam PGRI ranting 1 aktivitas-aktivitas yang disajikan dalam laporan arus kas disesuaikan dengan aktivitas yang terjadi di koperasi pada umumnya, termasuk koperasi simpan pinjam PGRI ranting 1, Koperasi simpan pinjam PGRI ranting 1 pada tahun 2018 tidak menyusun laporan arus kas. Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Contoh dari aktivitas operasi adalah penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya. Contoh dari aktivitas investasi adalah pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya, penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya, Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.n Contoh arus kas dari aktivitas pendanaan adalah penerimaan kas dari penerbitan saham

atau efek ekuitas lain, pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas, pelunasan pinjaman.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Pada koperasi simpan pinjam PGRI ranting 1 dalam catatan atas laporan keuangan yang disusun koperasi simpan pinjam PGRI 1, tidak menyajikan kebijakan akuntansi dari koperasi simpan pinjam PGRI ranting 1, penyajian catatan atas laporan keuangan di simpan pinjam PGRI ranting 1 hanya menyajikan informasi tambahan berupa pos-pos khusus sebagai tambahan informasi yang tidak ada didalam laporan keuangan simpan simpan pinjam PGRI ranting 1. Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa Catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan

pembahasan terhadap pelaporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam PGRI Ranting I Pondok Ranji dibandingkan terhadap penerapan SAK ETAP, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaporan keuangan berupa Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, Koperasi Simpan Pinjam PGRI Ranting I Pondok Ranji secara umum sudah menyajikan komponen laporan keuangan yang mendekati klasifikasi dari SAK ETAP, hanya masih butuh penyesuaian dan pemahaman yang lebih mengenai penyajian dan pelaporan yang sesuai dengan SAK ETAP.
2. Koperasi Simpan Pinjam PGRI Ranting I Pondok Ranji masih belum secara konsisten dalam melakukan pelaporan keuangan, terbukti dengan tidak disajikannya laporan arus kas pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Simpan Pinjam PGRI Ranting I Pondok Ranji, antara lain:

1. Sebaiknya Koperasi Simpan Pinjam PGRI Ranting I Pondok Ranji lebih melakukan penyesuaian dalam penyajian

laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK ETAP.

2. Koperasi Simpan Pinjam PGRI Ranting I Pondok Ranji diharapkan bisa lebih konsisten dalam penyajian laporan keuangan, karena laporan keuangan sangat penting sebagai sarana informasi untuk pihak intern Koperasi Simpan Pinjam PGRI Ranting I Pondok Ranji maupun pihak investor atau kreditur tentang keadaan keuangan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian
- Rudianto 2010. Akuntansi Koperasi Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga
- Kasiram, Moh. 2010 Metodologi penelitian: Kualitatif–Kuantitatif. UIN-Maliki Press, Malang.
- Munawir, 2004. Analisis Laporan Keuangan, Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Baridwan, Zaki, 2003. Intermediate Accounting STIE, Edisi Keempat, Yogyakarta
- Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada